



## **RINGKASAN RISALAH RAPAT BERBASIS AGENDA**

### **A. Informasi Umum**

Tanggal Rapat : Rabu, 1 Juli 2015  
Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : IV  
Rapat Ke : 35

### **B. Kehadiran Anggota**

- 1. Fraksi PDI Perjuangan
- 2. Fraksi Partai Golongan Karya
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
- 4. Fraksi Partai Demokrat
- 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
- 6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
- 8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
- 9. Fraksi Partai Nasional Demokrat
- 10. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat
- 61 dari 106 orang anggota, izin 15
- 45 dari 90 orang anggota, izin 14
- 41 dari 73 orang anggota, izin 12
- 32 dari 60 orang anggota, izin 8
- 25 dari 48 orang anggota, izin 4
- 15 dari 47 orang anggota, izin 7
- 20 dari 40 orang anggota, izin 6
- 20 dari 39 orang anggota, izin 4
- 18 dari 36 orang anggota, izin 3
- 7 dari 16 orang anggota, izin 4

### **C. Agenda Rapat**

1. Pandangan Fraksi-fraksi atas Pokok-pokok Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh pemerintah
2. Usulan program pembangunan daerah pemilihan

### **D. Ucapan Penting Per-Agenda Rapat**

1. Pandangan Fraksi-fraksi atas Pokok-pokok Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh pemerintah

**F-PDIP DANIEL LUMBAN TOBING**

ISI UCAPAN

- Salam sejahtera bagi kita semua.Om swasti astu.Merdeka!Yang terhormat Pimpinan Sidang,Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan.Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengingat bahwa DPR RI ikut pula mengawasi akuntabilitas penggunaan anggaran negara oleh pemerintah.Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23 huruf e ayat (1), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN Perubahan Tahun 2014.
- Terdapat permasalahan utang kepada pihak ketiga di tiga kementerian lembaga sebesar Rp.1,21 Triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; dan4.

**F-PG Ir ZULFADHLI**

ISI UCAPAN

- dan pemulihan lingkungan, temuan atas penyertaan modal negara dari konversi deviden beberapa BUMN, pertanggungjawaban imbalan pasca kerja ada SKK Migas, temuan mengenai kelemahan penatausahaan dan pengamanan aset tetap, temuan mengenai bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya dan masih munculnya temuan aset eks BPPN.Terkait dengan hasil audit BPK, Fraksi Partai Golkar meminta keseriusan dari Pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara terutama menyangkut 30 temuan pemeriksaan yang terdiri atas 21 temuan pemeriksaan terkait sistem pengendalian internal dan 9 temuan pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pemenuhan amanat konstitusi dalam bidang pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang.Di samping itu Fraksi Partai Golkar masih melihat adanya temuan BPK yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya.
- Fraksi Partai Golkar mengharapkan Pemerintah untuk lebih meningkatkan penerimaan negara di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan data wajib pajak khususnya wajib pajak pribadi yang masih jauh dari potensi wajib pajak pribadi riil yang kita miliki seiring pertumbuhan kelas menengah di Indonesia.Realisasi belanja negara tahun anggaran 2014 berjumlah Rp1.777,18 triliun yang berarti mencapai 94,69% dari APBNP tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.876,84 triliun.

## **KETUA RAPAT**

### **ISI UCAPAN**

- nomor A-558 dari Fraksi Partai Hanura. Sidang Dewan yang kami hormati. Dengan demikian telah selesailah sudah di agenda acara kita yang pertama yaitu penyampaian dan pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban APBN 2014.
- Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Akt.

## **F-P GERINDRA Ir BAMBANG HARYO SOEKARTONO**

### **ISI UCAPAN**

- Sementara itu agenda pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas dalam menggerakkan perekonomian nasional tidak banyak mengalami kemajuan. Bapak Ibu peserta sidang yang kami muliakan. Berdasarkan uraian di atas, kami dari Fraksi Partai Gerindra mengajak kita semua menyatukan visi dalam membahas Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 sebagai komitmen untuk melakukan koreksi terhadap praktek kebijakan fiskal agar bisa sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kami dari Fraksi Partai Gerindra setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014. Demikian pandangan kami dari Fraksi Partai Gerindra, atas perhatiannya kami haturkan Terima kasih. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. PIMPINAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ketua, Wakil Sekretaris, H.
- Trend selama ini, selama 3 tahun terakhir ini yang terus menerus turun tentu menimbulkan kritik terhadap peran Pemerintah di dalam menggerakkan sektor ekonomi secara nasional. Bapak Ibu Anggota sidang yang netnahagia. Kualitas kebijakan fiskal Pemerintah yang dilihat dari rasio hutang, pembayaran pokok hutang dan bunga terhadap pendapatan faktor Service Ratio (DSR) juga memburuk.

## **F-PD Ir H, MARWAN CIK ASAN, MM**

### **ISI UCAPAN**

- Laporan arus kas tahun anggaran 2014 dan catatan atas laporan keuangan yang disertai dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan Negara, Badan Layanan Umum dan Badan lainnya. Saudara Pimpinan; dan Anggota Dewan yang terhormat Hadirin yang berbahagia. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah realisasi pendapatan Negara dan hibah tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.554 triliun atau 94,81 persen dari target APBNP 2014.
- Sebagai sebuah instrumen APBN bukan merupakan hasil akhir tetapi sebuah proses yang dalam realisasinya perlu terus mendapatkan perhatian dan pengawasan untuk memastikan bahwa APBN telah dialokasikan tepat guna, tepat sasaran dan tidak menyimpang serta bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan ketentuan perundangan di atas paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun-tahun anggaran, pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang telah disampaikan pada Sidang Paripurna 24 Juni 2015 yang lalu.

## **F-PAN ANDI TAUFAN TIRO, ST**

### **ISI UCAPAN**

- Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi PAN meminta Pemerintah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan serta keakuratan dan kelengkapan transaksi yang memadai termasuk penting pula untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak bermasalah dan tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.6.
- Hasil opini BPK Tahun 2014 ini lebih buruk dari pencapaian opini BPK pada Tahun Anggaran 2013 dimana pencapaiannya 65KL mendapatkan opini WTP, 19 Kementerian/Lembaga mendapatkan opini WDP dan 3 Kementerian/Lembaga mendapatkan opini TMP.

## **F-PKB H CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, SAg**

### **ISI UCAPAN**

- **Fraksi PKB mendesak kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan kewajiban tuntutan hukum kepada Pemerintah yang masih belum didukung dengan data yang handal.6.**
- Selanjutnya realisasi harga minyak mentah Indonesia 97 per barrel juga lebih rendah dari asumsi APBN 2014 sebesar US\$ 105 per barrel dan terakhir lifting minyak bumi Tahun 2014 hanya mencapai 794 ribu barrel per hari atau di bawah target dalam APBNP 2014 yaitu 818 ribu barrel per hari. Saudara Pimpinan, Sahabat Anggota, Menteri Keuangan, serta Hadirin yang terhormat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014, BPK memberi opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

## **F-PPS H ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE, MSi, Akt**

### **ISI UCAPAN**

- Selain itu jumlah LKKL yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian menurun dari 65 dari tahun 2013 menjadi 62 pada tahun 2014, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk terus meningkatkan penyajian 25 LKKL yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian tersebut. Hadirin yang kami muliakan, Fraksi PKS memberi catatan secara lebih khusus sebagai berikut:1.
- Aamiin ya robbal'alami.49PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Disampaikan oleh : Abdul Haris Almasryhari Nomor Anggota : A - 111 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta Hadirin yang kami hormati. Dalam menyikapi Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR pada Rapat Paripurna DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu memberikan beberapa catatan penting.

## **F-PPP Hj IRNA NARULITA, SE, MM**

### **ISI UCAPAN**

- Pandangan Fraksi-fraksi atas Pokok-pokok Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh pemerintah
- 1 Juli 2015Juru bicara: Hj.

#### **F- PARTAI NASDEM DONNY IMAM PRIAMBODO, ST, MM**

##### **ISI UCAPAN**

- Untuk menutup defisit direalisasikan pembiayaan neto sebesar Rp 248,89 triliun sehingga tercipta sisa lebih pembiayaan anggaran atau silva sebesar Rp 22,2 triliunPimpinan Sidang, Anggota DPR RI, dan Hadirin yang kami hormati,Selain temuan yang berasal dari laporan keuangan tersebut, terdapat beberapa temuan terkait temuan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern, dan temuan terkait kepatuhan terhadap undang-undang Fraksi Partai Nasdem mencermati beberapa temuan yang berhubungan dengan penerimaan negara baik dari pajak maupun non pajak diantaranya:PPn untuk batubara, inkonsistensi dalam penghitungan PPh dan bagi hasil Migas bagian pemerintah, piutang, pajak kadaluarsa yang tidak ditagih di penjualan Migas bagian pemerintah oleh Pertamina, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terlalu besar tidak ditetapkan PBB terhadap sektor mineral dan batubara, permasalahan penerimaan negara bukan pajak di 44 kementerian dan lembaga, kekurangan penetapan nilai pajak terhutang kepada wajib pajak dan belum ditagihkan, ditagihnya sanksi bunga atau denda yang menjadi hak pemerintah.Mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang meningkat untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang mendesak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, kami meminta agar pemerintah dan aparat birokrasi benar-benar membenahi masalah-masalah yang berhubungan dengan penerimaan negara, dengan melengkapi pendataan lisensi yang komprehensif dan data tentang ketidakpatuhan pembayaran royalti.
- Hal ini disebabkan karena belum adanya formula perhitungan SAL yang ditetapkan secara formal.Pimpinan Sidang, Anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia.BPK mengungkapkan meskipun nilai catatan SAL per 31 Desember 2014 tersebut sama dengan nilai fisik SAL, namun terdapat permasalahan pada transaksi dan atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat karena salah satunya pemerintah belum memiliki metode perhitungan SAL yang menjamin saling uji antara catatan dan fisik SAL dilaksanakan secara menyeiuruh dan konsisten.Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah agar cermat dalam hal penghitungan SAL dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan SAL dapat menjaga akuntabilitas dalam penggunaan SAL serta mendorong penggunaan SAL kepada hal-hal yang lebih efektif.

#### **F-HANURA FERRY KASE, SH**

##### **ISI UCAPAN**

- Sebagian besar dari belanja negara terserap untuk belanja rutin sebesar 87,76 persen dibandingkan belanja modal yang setiap tahun penyerapannya selalu rendah.Terkait dengan hal tersebut Fraksi Partai Hanura DPR RI berpandangan bahwa pemerintah perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur melalui penetapan skala prioritas terhadap pembangunan

infrastruktur yang dilakukan dan memasukkan parameter waktu sebagai salah satu indikator dalam melakukan studi kelayakan untuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan di samping parameter lainnya yang telah ada. Hadirin yang kami hormati. Terkait dengan beberapa temuan BPK yang menyebabkan LKPP tahun anggaran 2014 mendapatkan opini WTP kembali, diantaranya pencatatan mutasi aset KKKS utang kepada pihak ketiga, permasalahan terkait saldo anggaran lebih dan permasalahan penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada pemerintah, Fraksi Partai Hanura DPR RI berpandangan sebagai berikut:1.

- Hal ini tercermin dalam laporan keuangan pemerintah pusat selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2012-2014, yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan meningkatnya jumlah kementerian lembaga yang mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat menjadi 7 kementerian lembaga pada tahun 2014 dari 3 kementerian lembaga pada tahun 2013, serta menurunnya jumlah kementerian lembaga mendapat opini wajar tanpa pengecualian selama periode 2012-2014. Buruknya pengelolaan keuangan pemerintah pusat disebabkan karena sistem pengendalian internal pemerintah yang masih lemah sehingga mengakibatkan kerugian dalam keuangan negara.

## 2. Usulan program pembangunan daerah pemilihan

### **KETUA RAPAT**

#### ISI UCAPAN

- Fraksi Partai Golkar, A-283. Kami persilakan selanjutnya pada Saudara H.

### **F-PG H MUKHAMAD MISBAKHUN, SE**

#### ISI UCAPAN

- Maka demi menjembatani beragam usulan dan aspirasi pembangunan daerah tersebut DPR RI sebagai representasi rakyat memandang usulan program pembangunan daerah pemilihan sebagai sebuah mekanisme sistem untuk memutus missing link yang selama ini menghambat program pemerataan pembangunan di negeri ini. Pimpinan dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati. Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan sebanyak Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang berjumlah 91 orang karena 1 orang belum dilantik, usulan yang diajukan menjadi 90 anggota. Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan DPR RI tentang mekanisme dan tata cara usulan program pembangunan daerah pemilihan yang telah disepakati dalam Sidang Paripurna tanggal 23 Juni 2015 yang lalu dan ini merupakan proses konstitusi yang harus dilalui. Usulan-usulan tersebut merupakan aspirasi dari masing-masing daerah pemilihan yang selama ini belum terakomodir dalam program-program pembangunan yang ada.
- Atas berbagai pertimbangan di atas dan demi terwujudnya pembangunan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, dengan ini Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju untuk segera menindaklanjuti usulan program pembangunan daerah pemilihan. Demikian usulan Fraksi Partai Golkar DPR RI disampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas dan amanah sebagai wakil rakyat untuk memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara demi terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wallahul Muwafiq

ila aqwamith Thariq Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.Jakarta, 1 Juli 2015.PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAKETUA, SEKRETARIS,ttddr.

**F-GERINDRA H BAMBANG RIYANTO, SH, MH, MSi**

**ISI UCAPAN**

- Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh laporan maupun pengaduan-pengaduan tentang suatu keadaan wilayah atau daerah yang memerlukan pembangunan infrastruktur, baik itu berupa perbaikan jalan, jembatan, air bersih, lingkungan, sanitasi, peningkatan sarana keagamaan, peningkatan sarana keolahragaan dan lain-lain.
- Usulan program pembangunan daerah pemilihan

**F-PD Ir E HERMAN KHAERON, MSi**

**ISI UCAPAN**

- Kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN dan APBD yang tidak ditangani oleh eksekutif dalam perencanaannya.
- Betapa rumit dan kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing- masing pihak punya keinginan dan rencana sendiri;d.

**F-PAN H TOTOK DARYANTO, SE**

**ISI UCAPAN**

- Di mana usulan ini meliputi penyediaan air bersih, pembangunan dan perbaikan tempat ibadah dan prasarana keagamaan, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan ternak, benih dan bibit, penyediaan sarana internet, penyediaan penerangan jalan umum, pembangunan dan perbaikan ialan desa.
- Usulan program pembangunan daerah pemilihan

**F-PKB Hj ROHANI VANATH**

**ISI UCAPAN**

- Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan meliputi peningkatan kualitas irigasi, pengadaan bibit tanaman hortikultura, pengadaan pupuk, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, penyediaan cool storage, pengadaan bibit ikan dan ternak, penyediaan kandang dan lain-lain.
- Pembangunan fasilitas pengembangan sumber daya manusia, meliputi sarana olah raga dengan pembangunan GOR, sarana kesenian dengan penambahan alat-alat kesenian, serta perpustakaan atau taman bacaan umum dan didukung dengan sarana internet.

**F-PKS Dr H ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP, M M**

**ISI UCAPAN**

- ' ' j l l l ' ' r 'Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita: : , :\*g| f - Ibisa menghadiri Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
- Usulan program pembangunan daerah pemilihan

**F-PPP Dra ELVIANA, MSi**

**ISI UCAPAN**

- Program Pembangunan Daerah Pemilihan pada satu sisi merupakan amanah konstitusi yakni sesuai dengan Pasal 80 huruf J Undang-undang No.
- Usulan program pembangunan daerah pemilihan

**F HANURA MOH ARIEF S SUDITOMO, SH, MA**

## ISI UCAPAN

- Usulan program pembangunan daerah pemilihan